

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang diberikan variabel ukuran pemerintah, kekayaan daerah, dan *political monitoring* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sampel yang digunakan pada penelitian ini meliputi seluruh LKPD wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang telah diaudit BPK RI pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil pada penelitian, tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia menunjukkan rata-rata sebesar 78% yang mana menandakan masih banyak pemerintah kabupaten dan kota yang belum mengungkapkan item pengungkapan pada LKPD secara maksimal sesuai dengan standar yang berlaku hasil uji pengaruh yang diberikan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan pada LKPD tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya ukuran pemerintah.
2. Kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan pada LKPD tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya kekayaan suatu daerah.
3. *Political monitoring* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pengawasan politik akan diikuti dengan tingkat pengungkapan LKPD yang juga semakin tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rangkaian proses yang telah dilakukan pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang meliputi :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel LKPD pada kabupaten dan kota di Indonesia yang terbatas hanya pada satu periode saja, yaitu tahun anggaran 2022.
2. Terdapat beberapa kabupaten dan kota yang belum menyetorkan LKPD secara lengkap kepada BPK.

5.3 Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya, meliputi :

a. Saran Teoritis

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel LKPD menjadi lebih dari satu periode tahun anggaran. Selain itu, pada penelitian ini variabel ukuran pemerintah dan kekayaan daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain, seperti luas wilayah dan pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran.

b. Saran Praktis

1. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan kota diharapkan lebih memaksimalkan pengungkapan informasi pada LKPD sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 sehingga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat daerah.

2. Bagi BPK Republik Indonesia

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, diupayakan bisa melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terkait penggunaan dana yang diberikan sebagai pihak eksternal melalui opini audit. Kondisi ini memiliki tujuan agar pemerintah daerah merasa terdorong untuk menyajikan laporan LKPD dengan lebih transparan.